



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM/TUNAI

Bahwa sesuai Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan Perseroan melalui iklan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 18 Mei 2016 dan menindaklanjuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2016 mengenai persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, antara lain untuk melaksanakan pembagian Dividen Saham, maka dapat disampaikan bahwa Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 28 Juni 2016 telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim/Tunai sebesar Rp. 30.661.319.674,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp. 2,00 (dua Rupiah) untuk setiap sahamnya.

Adapun jumlah Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan berasal dari laba bersih periode Januari – Maret 2016, dan digunakan untuk semata-mata melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemegang saham Perseroan yang muncul dari pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai tersebut. Dividen Interim/Tunai akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Kantor Pajak. Jika ada kelebihan nilai Dividen Interim/Tunai dari yang dibayarkan oleh Perseroan ke Kantor Pajak tersebut, maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk tunai kepada para pemegang saham yang berhak.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim/Tunai adalah sebagai berikut :

A. JADWAL :

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Interim/Tunai	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	12 Juli 2016 15 Juli 2016
2	Ex Dividen Interim/Tunai	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	13 Juli 2016 18 Juli 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang saham yang berhak mendapatkan Dividen Interim/Tunai	15 Juli 2016
4	Pembagian/Distribusi Dividen Interim/Tunai kepada pemegang saham Perseroan yang berhak	28 Juli 2016

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM/TUNAI :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen Interim/Tunai akan diberikan/didistribusikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2016.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, Dividen Interim/Tunai akan diberikan/didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembagian/pendistribusian Dividen Interim/Tunai melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Dividen Interim/Tunai akan dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim/Tunai. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim/Tunai yang dibagikan/didistribusikan akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal, sehingga bilamana terdapat kekurangan bayar, akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, yang dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Dividen Interim/Tunai. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Jakarta, 29 Juni 2016

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi